



Katalog BPS : 9302004.6401

PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2011-2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**



Katalog BPS : 9302004.6401

PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2011-2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGGUNAAN
KABUPATEN PASER
TAHUN 2011 - 2013**

**No. Katalog : 9199007.6401
No. Publikasi : 64.015.1405
Ukuran buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah halaman : xiii + 69 halaman**

Naskah :

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser**

Penyunting :

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser**

Gambar kulit :

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser**

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku ***Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Penggunaan Tahun 2011-2013***, merupakan pasangan dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha, yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

Jika dalam publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha diperoleh gambaran struktur perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan sebagainya, maka dalam publikasi PDRB menurut Penggunaan diperoleh gambaran mengenai produk domestik regional yang diuraikan dalam komponen-komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut adalah Konsumsi Rumah tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, serta komponen Ekspor dan Impor.

Adapun data yang dipakai dalam penghitungan komponen-komponen PDRB menurut Penggunaan diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini akan membantu pihak perencana daerah, para analis, serta lembaga/instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan kali ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, diucapkan terima kasih.

Tana Paser, September 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser,



Ir Bahramsyah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK ..	vii
DAFTAR LAMPIRAN ..	viii
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Umum	2
B. Pengertian Mengenai PDRB Menurut Penggunaan.....	3
C. Publikasi	4
BAB II. METODE PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	7
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	21
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33
2.5. Perubahan Inventori	37
2.6. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	42

	<i>Halaman</i>
BAB III. TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN	47
BAB IV. PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2011 – 2013	52
4.1. Konsumsi Rumahtangga	52
4.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumahtangga (LNPRT)	55
4.3. Konsumsi Pemerintah	55
4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	57
4.5. Perubahan Inventori	58
4.6. Ekspor	59
4.7. Impor	60
DAFTAR ISTILAH PENTING	62
LAMPIRAN (Tabel-tabel)	66

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1.1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013	53
Tabel 4.1.2. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	54
Tabel 4.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	55
Tabel 4.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	56
Tabel 4.4.1 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	57
Tabel 4.5. Perkembangan Perubahan Inventori, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	58
Tabel 4.6. Perkembangan dan Struktur Ekspor, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013.....	60
Tabel 8. Perkembangan dan Struktur Impor, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2013	61

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Kabupaten Paser (ADHB), Tahun 2010 – 2013	47
Grafik 2. PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2000), Tahun 2010 – 2013	48
Grafik 3. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2000) Tahun 2010 – 2013	49
Grafik 4. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2012 -2013	50

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2011 – 2013 (Jutaan Rupiah)	66
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2011 – 2013 (Persen)	67
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2011 – 2013 (Persen)	68
Tabel 4. Indeks Implisit Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2011 – 2013	69
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Kabupaten Paser Menurut Penggunaan, Tahun 2011 – 2013	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*). Nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. Nilai PDRB yang demikian disebut PDRB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Domestic Regional Product by Expenditure*), atau disebut juga sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Permintaan domestik dapat berupa konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto, sedangkan permintaan dari luar wilayah domestik adalah berupa ekspor. Namun, karena untuk memenuhi permintaan terhadap barang dan jasa dari suatu wilayah belum mencukupi, maka dipenuhi dari luar wilayah (impor). Dalam PDRB menurut penggunaan, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa disebut dengan ekspor neto. Selisih antara permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) yang mencerminkan perbedaan statistik (*statistical discrepancy*) dicakup dalam perubahan inventori (*change in inventories*).

Penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Paser menurut Penggunaan dimaksudkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan data tentang komponen PDRB penggunaan yang semakin meningkat, misalnya mengenai pengeluaran konsumsi rumahtangga baik berupa konsumsi makanan maupun non makanan juga pengeluaran konsumsi pemerintah baik berupa pengeluaran aparatur maupun pelayanan publik. Hal yang juga penting adalah terkait dengan perkembangan data investasi fisik (PMTB) hingga ekspor hasil SDA Kalimantan Timur.

Dalam publikasi ini pembahasan dimulai dengan tinjauan PDRB menurut penggunaan secara agregat, dan dilanjutkan dengan perkembangan rincian komponen PDRB menurut penggunaan. Adapun cakupan periode pembahasan adalah selama periode tahun 2010 - 2013

B. PENGERTIAN MENGENAI PDRB MENURUT PENGGUNAAN

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Dilihat dari sisi permintaan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa (*output*) yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi langsung oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran (*expenditure*) yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu daerah/wilayah selama satu tahun. Institusi-institusi tersebut terdiri atas rumahtangga, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan konsep ekonomi makro, PDRB menurut penggunaan terbagi menjadi empat kelompok pengeluaran utama, yaitu pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk kegiatan investasi, pengeluaran/belanja sektor pemerintahan dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Penghitungan PDRB menurut penggunaan disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga masing-masing tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai berdasarkan harga tahun dasar yaitu tahun 2000.

Penghitungan PDRB Kabupaten Paser menggunakan harga berlaku menjelaskan tentang perkembangan nilai nominal PDRB Kabupaten Paser, yang selain dipengaruhi oleh perkembangan kuantitas permintaan juga dipengaruhi oleh perkembangan harga. Sedangkan dengan harga konstan, pengaruh perubahan harga sudah dihilangkan dari penghitungan PDRB, sehingga nilai PDRB atas dasar harga konstan merupakan perkembangan riil dari PDRB pada suatu periode waktu tertentu.

C. PUBLIKASI

Dalam penyusunan publikasi PDRB, disajikan dalam bentuk yaitu PDRB menurut penggunaan dan PDRB menurut Lapangan. Masing-masing publikasi tersebut disajikan sesuai maksud dan tujuannya serta sistematika penulisannya.

1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan

Publikasi ini diterbitkan dalam susunan yang sama dengan publikasi PDRB menurut lapangan usaha. Perbedaannya pada rincian, yaitu lapangan usaha diganti dengan komponen penggunaan. Komponen tersebut adalah: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori dan Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor).

2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Publikasi ini berisi tabel-tabel nilai tambah bruto sektoral, laju pertumbuhan, distribusi persentase dan PDRB per kapita, atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000. Penyajian dibedakan menurut PDRB migas dan nonmigas.

BAB II

METODE PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Pembahasan dalam bagian ini dimulai dengan beberapa definisi dasar dan diuraikan secara lengkap mengenai konsep, definisi, serta metodologi yang digunakan dalam penghitungan komponen-komponen PDRB Menurut Penggunaan.

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atau pembelian barang dan jasa yang tujuannya hanya untuk dikonsumsi, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran dalam suatu periode tertentu. Selain pembelian untuk bahan makanan, pakaian, bahan bakar, barang tahan lama dan jasa-jasa, pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk juga pembelian barang yang tidak ada duanya (tidak diproduksi kembali) seperti karya seni, barang antik. Pengeluaran untuk rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan kecil rumah, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi.

2.1.2. Ruang Lingkup

Pada dasarnya penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga menggunakan pendekatan penduduk. Namun demikian, konsumsi rumah tangga dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan wilayah.

Kasus batas

Bila dalam memperkirakan konsumsi rumah tangga ada hal-hal yang menimbulkan keraguan, misal penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya. Biasanya penduduk tersebut mengeluarkan uang untuk memenuhi konsumsinya baik berupa barang (makanan, bukan makanan) ataupun jasa-jasa lainnya. Pengeluaran yang dilakukan selama berada di daerah lain tersebut menurut konsep harus diperhitungkan sebagai impor (barang masuk). Tetapi karena belum tersedianya data yang mencatat berapa jumlah penduduk yang bepergian serta jumlah biaya yang dikeluarkan selama di daerah lain, maka pengeluaran yang semacam ini sudah terhitung di rumah tangganya yaitu melalui konsumsi perkapita. Begitu pula sebaliknya, penduduk dari daerah lain yang berada di daerah tersebut, seharusnya diperlakukan sebagai ekspor, namun karena tidak tersedianya data, maka diasumsikan merupakan konsumsi rumah tangga di daerah asalnya.

Di samping kasus batas di atas, juga perlu diperhatikan kasus batas mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi.

1. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi barang dan jasa berikut:

a. Jasa tempat tinggal yang ditempati sendiri;

b. Pendapatan dan sejenisnya seperti:

- barang dan jasa yang diterima sebagai pendapatan dan sejenisnya oleh pekerja
- barang dan jasa yang diproduksi sebagai output usaha rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi oleh anggota rumah tangga. Dalam hal ini seperti makanan dan barang hasil pertanian, jasa perumahan yang ditempati sendiri, dan jasa rumah tangga yang dihasilkan dengan mempekerjakan pekerja dibayar (PRT, tukang kebun, sopir dsb).

- c. Item-item yang tidak diperlakukan sebagai konsumsi antara, seperti:
 - material untuk perbaikan kecil dan dekorasi interior tempat tinggal yang dilakukan oleh penyewa atau pemilik;
 - materi untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap barang tahan lama, termasuk kendaraan.
 - d. Item-item yang tidak diperlakukan sebagai pembentukan modal, khususnya barang tahan lama, yang kontinyu melakukan fungsinya dalam beberapa periode pencatatan; termasuk transfer kepemilikan barang tahan lama dari perusahaan untuk rumah tangga.
 - e. Biaya jasa finansial langsung;
 - f. Jasa asuransi ;
 - g. Jasa dana pensiun
 - h. Pembayaran oleh rumah tangga untuk surat izin (*license*) dan sebagainya yang dipertimbangkan sebagai pembelian jasa-jasa.
 - i. Pembelian output dengan harga secara ekonomi tidak signifikan, seperti ongkos masuk museum.
2. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga tidak termasuk:
- a. transfer sosial dan sejenisnya, seperti pengeluaran yang awalnya dilakukan rumah tangga tetapi setelah itu digantikan oleh lembaga penjamin sosial, seperti biaya kesehatan;

- b. item-item yang diperlakukan sebagai konsumsi antara atau pembentukan modal bruto, seperti:
- pengeluaran-pengeluaran oleh rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga ketika digunakan untuk tujuan usaha, contohnya atas barang tahan lama seperti kendaraan, furnitur atau peralatan elektrik (pembentukan modal tetap bruto), dan juga atas barang-barang tidak tahan lama seperti bahan bakar (konsumsi antara);
 - pengeluaran dekorasi oleh penghuni rumah sendiri, pemeliharaan dan perbaikan tempat tinggal yang tidak khas dilakukan oleh penyewa (diperlakukan sebagai konsumsi antara dalam produksi jasa perumahan);
 - pembelian perumahan (diperlakukan sebagai pembentukan modal tetap bruto);
 - pengeluaran barang berharga (diperlakukan sebagai pembentukan modal tetap bruto).
- c. item-item yang diperlakukan sebagai akuisisi aset-aset yang tidak diproduksi, khususnya pembelian tanah;
- d. semua pembayaran oleh rumah tangga yang dipertimbangkan sebagai pajak, seperti surat izin untuk kendaraan sendiri, kapal atau pesawat terbang dan juga surat izin untuk berburu, menembak atau memancing;
- e. sumbangan, kontribusi dan iuran yang dibayarkan rumah tangga kepada LNPRT, serikat dagang, perkumpulan profesional, lembaga konsumen, masjid, gereja dan sosial, budaya, klub rekreasi dan olah raga;
- f. transfer non-profit atau sejenisnya oleh rumah tangga kepada organisasi amal, fakir miskin dan bantuan.

2.1.3. Sumber Data

Konsumsi rumah tangga datanya bersumber dari hasil Susenas, yaitu rata-rata konsumsi perkapita seminggu (kuantum) untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan (rupiah) untuk kelompok bukan makanan. Disamping itu digunakan juga data lainnya seperti pendapatan perkapita atas dasar harga konstan yang bersumber dari PDRB sektoral (lapangan usaha). Rata-rata harga eceran dan Indeks Harga Konsumen bersumber dari Statistik Harga Konsumen di kota dan pedesaan. Jumlah penduduk pertengahan tahun bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data proyeksi penduduk. Serta data-data lain seperti informasi dari asosiasi dan perusahaan retail.

2.1.4. Metode Penghitungan

Metode penghitungan yang biasa dipakai untuk menghitung besarnya pengeluaran rumah tangga adalah:

1. Metode langsung

Metode langsung ini pada pokoknya adalah untuk memperoleh pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dengan cara menggunakan rasio yang diperoleh dari Survei Pengeluaran Rumah Tangga. Data yang dikumpulkan dengan metode ini mengukur arus barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga atas dasar harga pembelian. Pada dasarnya metode ini menyeluruh dalam ruang lingkup barang dan jasa yang diselidiki dan dapat dipakai untuk menganalisa pengeluaran konsumsi rumah tangga, menurut jenis barang dan tujuan pengeluaran. Metode ini memungkinkan klasifikasi data pengeluaran menurut karakteristik rumah tangga seperti tingkat pendapatan atau status ekonominya. Apabila metode ini dipakai, hasil yang akan diperoleh hanyalah pengeluaran konsumsi yang termasuk pengeluaran langsung di dalam wilayah oleh rumah tangga penduduk, sedangkan pengeluaran oleh turis, anggota diplomatik dan lain-lain tidak termasuk dalam survei yang diadakan.

- a. Survei-survei tersebut pada umumnya hanya mencakup sebagian kecil rumah tangga atau hanya ditujukan pada kelompok tertentu dari penduduk saja.
- b. Rumah Tangga khusus biasanya belum tercakup.
- c. Penyimpangan-penyimpangan data yang dikumpulkan dapat terjadi dalam data yang diberikan oleh rumah tangga dan kesulitan-kesulitan yang dapat dipercaya mengenai jenis-jenis pengeluaran terhadap barang yang jarang dibeli atau barang-barang yang terlarang diperjualbelikan.

Data yang dipakai untuk penghitungan konsumsi rumah tangga dengan metode ini adalah Susenas yang dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan. Selain penyimpangan di atas termasuk juga kelemahan Susenas ini adalah konsep yang dipakai agak berbeda dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pada Susenas adalah semua pembelian oleh rumah tangga untuk dikonsumsi, kalau barang yang telah dibeli dijual sebagian atau barang bekas yang dibeli setelah dipakai beberapa lama dijual kembali, tidak tercakup dalam Susenas. Seharusnya yang termasuk konsumsi adalah seluruh barang yang dibeli untuk dikonsumsi langsung, sedangkan barang bekas yang dikonsumsi hanyalah yang benar-benar dipakai atau sebesar selisih harga pembelian dengan harga penjualan. Namun oleh karena data lain tidak tersedia, maka data Susenas dapat juga dipakai dalam penghitungan konsumsi rumah tangga, dan harus dilengkapi dengan data lainnya.

2. Metode Arus Barang dan Jasa

Pendekatan dari segi arus barang dan jasa ini didasarkan atas penyediaan barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik dan impor, serta penyaluran barang dan jasa tersebut kepada para pemakai, termasuk kepada rumah tangga. Kalau metode arus barang dan jasa ini digunakan, maka akan diperoleh perkiraan konsumsi rumah tangga berdasarkan konsep pengeluaran rumah tangga di wilayah domestik.

Langkah-langkah dalam memperkirakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan memakai metode arus barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan (*supply*) barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari impor yang dinilai atas dasar harga pembelian, masing-masing dipisahkan menurut penggunaannya; dan penggunaan akhir dari tiap-tiap komoditi, tidak seluruhnya dipakai sebagai konsumsi rumah tangga dan perlu diadakan penyesuaian atas barang-barang yang hilang dan tercecer dalam penyalurannya.
- b. Barang yang mempunyai kegunaan ganda, harus diadakan survei khusus atau kasus untuk mengetahui berapa persen yang digunakan dalam konsumsi rumah tangga.
- c. Apabila tiap komoditi tersebut dinilai atas dasar harga produsen, harus diadakan margin perdagangan dan biaya transport termasuk pajak tidak langsung neto dari pada tiap-tiap komoditi, agar diperoleh nilai atas dasar harga pembeli.
- d. Memperkirakan barang dan jasa lainnya yang juga dikonsumsi oleh rumah tangga.

Penggunaan dengan metode arus barang, menuntut tersedianya data yang lengkap terutama barang yang masuk, baik dari luar negeri (impor) maupun antar wilayah lewat laut, darat dan udara. Tidak jarang barang yang masuk ke suatu daerah hanya merupakan transit, kemudian keluar lagi menuju daerah lain. Oleh karena data yang menunjang untuk keperluan penghitungan konsumsi ini sangat terbatas, maka metode arus barang ini perlu dilengkapi dengan metode penghitungan lain.

3. Metode Penilaian Harga Eceran

Metode ini dipakai apabila informasi yang ada hanya konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum dari tiap-tiap barang. Nilai dari konsumsi rumah tangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum barang tersebut dengan harga eceran yang dibayar oleh konsumen terhadap tiap jenis barang.

Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode arus barang dan jasa adalah pembelian barang-barang dinilai langsung atas dasar harga beli. Data kuantum yang tersedia mungkin lebih dapat dipercaya daripada nilai yang dikumpulkan. Sebaliknya menghitung harga eceran rata-rata yang dapat dipakai untuk menilai kuantum barang yang dibeli oleh rumah tangga adalah sulit. Hal ini disebabkan tidak tersedianya penimbang yang tepat untuk menimbang harga yang berbeda-beda menurut tempat, kualitas dan sebagainya.

Perkiraan mengenai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dapat bersumber dari data resmi penyediaan dan perubahan stok barang dan jasa, dari serikat-serikat dagang atau hasil-hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain konsumsi perkapita Susenas. Data mengenai jumlah penjualan barang yang terkena cukai misalnya minuman keras, rokok, dapat diperoleh dari Dinas Pajak. Dalam penghitungan konsumsi dengan metode ini yang digunakan adalah data Susenas yaitu rata-rata konsumsi perkapita seminggu dalam kuantum. Untuk mendapatkan nilai konsumsi dipakai rata-rata harga konsumen atau harga eceran yang sudah ditimbang.

4. Metode Penjualan Eceran

Metode ini sama halnya dengan metode langsung, mempunyai kelebihan yaitu dapat mengukur pengeluaran konsumsi rumah tangga pada saat terjadinya pembelian dengan harga yang sesungguhnya dibayar oleh konsumen. Kesulitan dalam menggunakan metode penjualan eceran ini adalah karena pedagang eceran tidak dapat memberikan keterangan secara lebih terperinci mengenai penjualan menurut jenis barang. Pada umumnya perkiraan tahunan dapat diperoleh dengan jalan mengekstrapolasikan perkiraan dasar. Indikator-indikator yang dipakai untuk ekstrapolasi diperoleh dari kuesioner-kuesioner

yang dikumpulkan secara teratur mengenai penjualan oleh pedagang eceran yang digolongkan menurut jenis usaha utamanya. Indikator semacam ini hanyalah merupakan perkiraan perkembangan dari penjualan barang dan jasa tertentu. Kecenderungan para pedagang eceran yang kurang mengkhususkan diri dalam menjual berbagai macam jenis barang tanpa mempunyai catatan yang terpisah untuk penjualan setiap jenis barang, akan mengakibatkan indikator-indikator ini kurang dapat dipercaya sebagai alat untuk mengekstrapolasikan perkiraan dasar berbagai jenis komoditi.

2.1.5. Cara Penghitungan

Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah gabungan dari metode langsung dan metode penilaian harga eceran. Cara ini dilakukan sehubungan dengan terbatasnya data yang ada. Data yang paling relevan untuk digunakan adalah dari hasil Susenas, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Data ini pun belum dapat dipakai langsung untuk mengestimasi series jumlah pengeluaran rumah tangga, karena data Susenas tidak tersedia setiap tahun, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya diestimasi dengan menggunakan koefisien elastisitas permintaan terhadap pendapatan (*elasticity of demand of income*) untuk kelompok konsumsi makanan dan untuk kelompok pengeluaran non makanan.

1. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi untuk kelompok ini digunakan gabungan antara metode langsung dengan metode harga eceran. Artinya konsumsi (kuantum) yang diperoleh dari Survei Rumah Tangga (Susenas) dinilai dengan harga eceran yaitu harga yang dibayar konsumen rumah tangga. Data konsumsi perkapita (kuantum) yang dipakai bersumber dari Susenas dalam bentuk rata-rata konsumsi perkapita dalam seminggu. Konsumsi perkapita sebulan didapatkan dengan cara mengalikan konsumsi perkapita seminggu dengan 30/7 (1 minggu = 7 hari).

Namun demikian survei Susenas, modul konsumsi tidak selalu dicacah tiap tahun karena survei ini hanya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali, maka untuk memperkirakan konsumsi

tahun lainnya digunakan analisa regresi silang (*Cross Regression Analysis*). Dalam regresi ini dikaitkan antara variabel pendapatan dengan variabel konsumsi. Dari regresi ini dapat diketahui koefisien elastisitas permintaan yaitu besaran yang menggambarkan perubahan permintaan suatu barang akibat berubahnya pendapatan. Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah Fungsi Eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, maka bentuk kurvanya seperti parabola.

Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$\ln a = \frac{\sum(\ln Q) - b \sum(\ln Y_i)}{n}$$

$$Q_i = aY_i^b$$

dimana: Q_i = Rata-rata konsumsi/kapita/sebulan(kuantum)

Y_i = Pendapatan/kapita/sebulan

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Sebelum digunakan untuk mengestimasi, terhadap nilai koefisien (b) ini dilakukan pengujian untuk meyakinkan koefisien ini dapat dipakai atau tidak. Syarat yang harus dipenuhi adalah nilai koefisien b harus significant (*highly significant*) dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) yang tinggi atau mendekati 1 (satu).

Untuk menyederhanakan penghitungan persamaan eksponensial $Q_i = a.Y_i^b$ dibentuk dalam persamaan linier dengan melogaritmakannya.

$$Q_i = a.Y_i^b$$

$$\ln Q_i = \ln (aY_i^b)$$

$$\ln Q_i = \ln a + b \ln Y_i$$

$$b = \frac{\sum(\ln Y_i)(\ln Q_i) - \frac{\sum(\ln Y_i)\sum(\ln Q_i)}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}$$

$$Sb^2 = \frac{\sum(\ln Q_i)^2 - \frac{\sum(\ln Q_i)^2}{n} - \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i) - \frac{\sum(\ln Q_i)\sum(\ln Y_i)}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}}{(n-2)\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}$$

$$R^2 = \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i) - \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i)}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n} - \frac{\sum(\ln Q_i)^2 - \frac{\sum(\ln Q_i)^2}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}}$$

t tabel $\alpha = 10\%$; 5% , a = anti log a

$$t_{obs} = \frac{b}{Sb}$$

Ketentuan nilai b harus *significant/highly significant*, maksudnya adalah sebagai berikut:

t obs. ($\alpha = 10\%$; $\beta = 5\%$) > t (tabel) untuk nilai t observasi positif

t obs. ($\alpha = 10\%$; $\beta = 5\%$) < t (tabel) untuk nilai t observasi negatif

Catatan

Bentuk hipotesa adalah sebagai berikut:

$$H_0 : b = 0$$

$$H_1 : b \neq 0$$

$b = 0$ artinya antara pengeluaran dan konsumsi tidak ada hubungan.

$b \neq 0$ artinya terdapat hubungan antara besarnya pengeluaran dan banyaknya konsumsi.

Koefisien elastisitas (b) yang didapatkan dengan regresi silang tersebut digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita tahun lainnya atau pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Dengan menggunakan variabel lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), konsumsi perkapita (data Susenas), maka konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan.

Formulasinya adalah:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

dimana:

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun $(n+1)$

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar (n) /data Susenas

dpt = Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke- n dengan tahun ke $n+1$

b = Koefisien elastisitas

Konsumsi makanan rumah tangga diperkirakan melalui:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

Dengan formulasi tersebut didapatkan konsumsi dalam satuan kuantum, perkapita sebulan. Total konsumsi penduduk akan diperoleh bila dikalikan dengan 12 dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memperoleh nilai konsumsi atas dasar harga berlaku dikalikan dengan harga konsumen atau harga eceran. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dengan harga eceran di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tetap (tahun dasar) atau harga tahun dasar menurut series PDB atau PDRB.

2. Konsumsi Kelompok Rumah Tangga Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok bukan makanan sama dengan metode kelompok makanan yaitu dengan menghitung koefisien elastisitas (b) dari masing-masing jenis pengeluaran rumah tangga, yaitu regresi linier. Regresi linier tersebut adalah:

$$Q_i = a + b.Y_i$$

dimana : Q = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan

a = konstanta

b = koefisien elastisitas

Y_i = pendapatan perkapita sebulan

Sehingga bentuk formulasinya adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{\sum(QY) - \frac{\sum(Y)\sum(Q)}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n}}$$
$$a = \frac{\sum(Q) - b.\sum(Y)}{n}$$

$$Sb^2 = \frac{\sum(Q)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n} - \frac{\sum(Q)(Y) - \frac{\sum(Q)\sum(Y)^2}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n}}}{(n-2)\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n}}$$

$$R^2 = \frac{\sum(Y)(Q) - \frac{\sum(Y)\sum(Q)^2}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n} \sum(Q)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n}} : r = \sqrt{R^2}$$

t tabel $\alpha = 10\%$; 5%

Ketentuan dan bentuk hipotesanya sama seperti pada Elastisitas Konsumsi Makanan.

Kemudian dengan menggunakan formulasi:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

diperoleh konsumsi pada tahun ke (n+1).

Konsumsi perkapita sebulan atas dasar harga konstan didapatkan dengan cara mendeflate konsumsi perkapita (nilai data Susenas), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. IHK yang digunakan adalah indeks yang tahun dasarnya telah disesuaikan dengan tahun dasar series PDRB (misalnya tahun 2000). Untuk memperkirakan konsumsi perkapita sebulan di tahun lainnya digunakan formulasi yang sama yaitu:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

Seperti halnya yang digunakan dalam kelompok makanan, variabel yang sama dipakai adalah dpt (selisih pendapatan perkapita harga konstan tahun n dengan tahun n+1).

Dengan menggunakan penduduk pertengahan tahun, maka total nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan dapat diestimasi, yaitu dengan mengalikan konsumsi perkapita sebulan atas dasar harga konstan dengan 12 dan jumlah penduduk masing-masing tahunnya.

Nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku didapatkan dengan cara meng"inflate"/mengalikan total nilai konsumsi atas dasar harga konstan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks tersebut adalah sama dengan yang digunakan untuk menginflate konsumsi perkapita sebulan (Susenas). Estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya memperhitungkan konsumsi dari lembaga nirlaba (LNPR), dikarenakan survei lembaga nirlaba cakupannya masih terbatas.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah berbagai pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa oleh lembaga-lembaga sosial yang secara prinsip mempunyai fungsi utama dalam melayani RT. Pengeluaran jenis institusi ini digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran akhir untuk tujuan menjaga keberlangsungan usahanya.

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan satu entitas legal yang secara prinsip terlibat dalam pelayanan/pemberian jasa kepada RT (*non-market*). Seluruh pembiayaan kegiatan lembaga ini bersumber dari sumbangan atau donasi RT, oleh karena itu hampir seluruh aktivitasnya dirancang dan dikontrol oleh RT. Pada umumnya sebagian besar pekerjanya merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan bagian dari Lembaga Nonprofit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai fungsi dan tugasnya LNP ada yang melayani RT dan ada yang melayani bukan RT, sedangkan yang dimaksud di sini adalah LNP yang khususnya melayani RT. Dalam *System of National Accounts 1993 (SNA'93)*, LNPRT dianggap sebagai satu sektor institusi (pelaku ekonomi) tersendiri dalam suatu perekonomian di samping pelaku-pelaku konsumsi akhir lainnya seperti Rumah Tangga, Perusahaan/Bisnis, dan Pemerintahan Umum.

Lembaga Nonprofit yang di dalamnya terdapat LNPRT, secara garis besar menurut sektor kelembagaan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Klasifikasi Jenis LNP Menurut Sektor Kelembagaan

Kelompok LNP	Jenis LNP	Sektor Kelembagaan
Produsen Jasa Komersial	a. Yang melayani masyarakat umum	Bisnis
	b. Yang melayani kelompok dunia usaha, kecuali yang dibiayai pemerintah	Bisnis
Produsen Jasa Non Komersial	c. Yang dibiayai pemerintah baik keberadaannya terikat maupun tidak	Pemerintah Umum
	d. Yang dibiayai anggota masyarakat dan khusus melayani anggota organisasi	LNPRT
	e. Yang dibiayai anggota masyarakat dan melayani masyarakat umum	LNPRT

Dari penggolongan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan Lembaga Nonprofit dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa layanan komersial

LNP pada kelompok ini adalah lembaga nonprofit yang menjual jasa layanannya pada tingkat harga pasar (komersial), yaitu harga yang didasarkan atas biaya produksi. Jasa yang dihasilkan lembaga ini secara keseluruhan berpengaruh terhadap persediaan (*supply*) dari jenis jasa tersebut. Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas:

- a. LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi masyarakat umum seperti lembaga penyelenggara pendidikan dan kesehatan.
- b. LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kalangan dunia usaha seperti serikat pekerja, asosiasi bisnis, kamar dagang, dan sebagainya.

2. Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa layanan non komersial

Pada kelompok ini adalah LNP yang menjual jasa layanannya pada tingkat di bawah harga pasar (non-komersial), yaitu penentuan harganya tidak didasarkan pada biaya

produksi. Bahkan terkadang jasa layanan itu diberikan secara cuma-cuma. Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas:

- a. LNP yang kegiatan pelayanannya sebagian besar dibiayai oleh pemerintah, baik keberadaannya terikat (pada pemerintah) maupun tidak. Contohnya adalah PMI, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Dharma Wanita, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan sebagainya.
- b. LNP yang dibentuk dan dibiayai oleh anggota masyarakat. Lembaga ini dengan kata lain disebut Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (LNPRT). Kemudian lembaga-lembaga yang termasuk sebagai LNPRT dibedakan menjadi:
 - LNP yang menyediakan jasa khusus untuk anggota-anggotanya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan sebagainya.
 - LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti LSM, organisasi sosial, organisasi bantuan kemanusiaan, organisasi pemberi bea siswa, dan sebagainya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan LNPRT adalah Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa sosial kemasyarakatan non komersial dengan dana dari masyarakat atau iuran anggota organisasi (dijual pada tingkat harga di bawah harga pasar) atau dibelikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan anggota organisasi.

Ciri dari kegiatan LNP adalah:

1. LNP pada umumnya lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui masyarakat.
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga.

3. Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus. *Profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
5. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus usaha melalui kegiatan produktifnya. Surplus usaha yang diperoleh akan diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Lembaga Nonprofit (LNP) sebagai induk dari LNPRT adalah lembaga yang keberadaannya bersifat formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha, dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan. Jadi tujuan pembentukannya tidak dimaksudkan untuk memperoleh sumber pendapatan ataupun profit bagi unit yang mengontrol dan membiayainya.

2.2.2. Ruang Lingkup

Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), mencakup 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Sosial (ORSOS), Organisasi Profesi (ORPROF), Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.2.3. Metodologi

Pengeluaran konsumsi akhir atau biaya-biaya produksi LNPRT merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, anggota organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya-biaya produksi ini sama dengan nilai konsumsi (antara) barang dan jasa ditambah dengan biaya-biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi yang dicatat adalah nilai yang benar-benar dikeluarkan oleh lembaga atas

penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi ditambah dengan yang berasal dari produksi sendiri dan pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma (transfer), maka nilainya harus diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan pengeluaran akhir konsumsi LNPRT dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pengeluaran lembaga lain (contoh RT) untuk kegiatan LNPRT ini.

1. Metode Langsung

Metode Langsung digunakan pada pencacahan secara sampel, di mana nilai yang diperoleh merupakan hasil estimasi terhadap rata-rata sampel.

Yang dihitung adalah *rata-rata biaya layanan per lembaga* yaitu:

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$$

Di mana: x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i

\bar{x}_i = rata-rata sampel nilai biaya layanan bentuk LNPRT kode-i

n_i = banyaknya sampel bentuk LNPRT kode-i

Jika rata-rata nilai biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga (\bar{x}_i) dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode ke i (N_i), maka akan didapat estimasi nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode ke i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$. Nilai estimasi konsumsi akhir LNPRT merupakan penjumlahan nilai konsumsi akhir seluruh bentuk LNPRT

$$\left(\sum_{i=1}^7 x_i \quad \text{atau} \quad \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i \cdot N_i \right)$$

Sedangkan perhitungan biaya layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung menggunakan bobot Indeks Harga Konsumen untuk masing-masing rincian pengeluaran dengan rumus sebagai berikut

$$m_k = \frac{x_k}{a_k}$$

di mana: m_k = nilai biaya untuk rincian pengeluaran ke k (atas dasar harga konstan)

X_k = nilai biaya untuk rincian pengeluaran ke k (atas dasar harga berlaku)

k = rincian pengeluaran = 1,2,.....,n

a_k = IHK untuk rincian pengeluaran ke k,

sehingga total nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk masing-masing lembaga adalah

$$M = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}$$

Dengan cara penghitungan di atas, maka dapat dihitung nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk setiap bentuk lembaga sebanyak sampelnya (n_1), sebagai berikut:

$$y_i = \sum_{j=1}^{n_i} M_{ij}$$

di mana: Y_i = nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan)

M_{ij} = Nilai konsumsi akhir lembaga ke j dari bentuk lembaga kode i

i = kode bentuk lembaga = 1,2,.....,7

j = urutan lembaga dari lembaga kode i = 1,2,.....,ni

sedangkan nilai total pengeluaran seluruh lembaga atas dasar harga konstan adalah

$$\sum_{i=1}^7 Y_i \text{ atau } \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij} \quad (i = \text{kode lembaga} = 1,2,\dots,7 ; j = \text{urutan lembaga dari}$$

lembaga kode $i = 1,2,\dots,ni$.)

Nilai total biaya layanan masing-masing bentuk LNPRT atas dasar harga konstan (M_i) dibagi

dengan total sampel untuk setiap bentuk lembaga kode i yang bersangkutan $\left(\bar{M}_i = \frac{M_i}{n_i} \right)$

akan menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan). Hasil ini jika dikalikan dengan populasi masing-masing bentuk lembaga atau $(\bar{M}_i \cdot N_i)$ akan menghasilkan kode (atas dasar harga konstan). Penjumlahan nilai konsumsi

akhir dari seluruh bentuk LNPRT $\left(\sum_{i=1}^7 \bar{M}_i N_i \right)$ adalah konsumsi akhir LNPRT (atas dasar harga konstan).

2. Metode Tidak Langsung

Merupakan pendekatan lain dalam menghitung konsumsi akhir LNPRT. Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaannya) berdasarkan pengeluaran dari lembaga-lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT tersebut. Caranya adalah dengan menghitung besaran pengeluaran unit-unit atau lembaga-lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut untuk membiayai aktivitasnya. Sebagai contoh: apabila pengeluaran untuk LNPRT adalah sebesar n persen dari total nilai konsumsi rumah tangga maka besaran pendapatan LNPRT adalah n persen dikali dengan total pengeluaran RT (pendekatan pengeluaran). Kemudian untuk menghitung komposisi pengeluaran LNPRT adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang berasal dari hasil survei-survei khusus. Dapat diasumsikan penerimaan dianggap sama dengan total pengeluaran.

Untuk mengukur pertumbuhan riil konsumsi LNPRT dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai dari masing-masing komponen pengeluaran akhirnya
- b. Metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan mengalikan sejumlah rasio (tetap) terhadap nilai konsumsi akhir RT, atas dasar harga konstan

$$Y_{LNPRT} = r \% \times C_{RT}$$

di mana: Y_{LNPRT} = Pendapatan LNPRT

$r \%$ = proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT

C_{RT} = pengeluaran konsumsi rumah tangga

Diasumsikan: Pendapatan LNPRT = Konsumsi LNPRT Sehingga

$$Y_{LNPRT} = (C_{LNPRT})$$

2.2.4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan penghitungan konsumsi akhir LNPRT diperoleh langsung dari hasil survei khusus. Data tersebut berupa nilai seluruh barang dan jasa yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri, maupun yang berasal dari transfer pihak lain yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahunan untuk masing-masing kelompok pengeluaran yang datanya diperoleh dari Statistik Harga Konsumen. Data ini digunakan untuk menentukan nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga konstan.

Untuk melakukan estimasi nilai konsumsi akhir, masih diperlukan data jumlah populasi LNPRT untuk masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan *listing* ke instansi-instansi terkait dan pengecekan langsung ke lapangan.

2.2.5. Keterbatasan dan masalah dalam penghitungan

Masalah yang biasanya ditemukan dalam penghitungan adalah:

1. Adanya nilai pengeluaran yang sangat besar dibanding dengan nilai yang pada umumnya dikeluarkan. Hal ini terjadi karena masih bercampurnya pengeluaran dari kegiatan jasa yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan jasa layanan, seperti jasa pendidikan dan kesehatan dan kegiatan ekonomis produktif.
2. Terkadang sulit menentukan bentuk lembaga jika hanya melihat dari lembaga. Suatu lembaga dengan satu nama terkadang bisa melakukan kegiatan lebih dari satu, seperti panti asuhan yatim piatu, bantuan sosial, dan pendidikan. Hal ini sulit dipisahkan karena lembaga tersebut hanya mempunyai satu pembukaan.
3. Banyak lembaga yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan terinci, sehingga banyak pengeluaran yang ditanyakan sulit untuk dijawab.

2.2.6. Perlakuan khusus

Pada lembaga yang mempunyai lebih dari satu kegiatan pelayanan, sedapat mungkin dipisahkan jenis pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan. Pada umumnya masing-masing LNPRT ini mempunyai ciri kegiatan yang berbeda yang pada akhirnya mengakibatkan struktur pengeluarannya juga berbeda-beda. Penetapan bentuk lembaga ini ditentukan oleh kegiatan ataupun tujuannya yang paling dominan.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan

penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar lainnya pemerintah.

Kegiatan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah:

1. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Contoh: pencetakan publikasi, kartu pos dan reproduksi dari karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, serta lainnya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga/departemen pemerintah tersebut, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**.
2. Kegiatan pemerintah yang menghasilkan jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.

2.3.2. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah provinsi mencakup konsumsi seluruh pemerintah desa, konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di wilayah pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan, konsumsi pemerintah daerah provinsi ditambah dengan konsumsi pemerintah pusat yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah daerah provinsi.

2.3.3. Sumber Data

Dalam penyusunan pengeluaran konsumsi pemerintah, digunakan berbagai macam data seperti:

1. Untuk pemerintah daerah berupa data Statistik Keuangan Daerah Provinsi (hasil pengolahan daftar Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia), Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota), Statistik Keuangan Desa (hasil pengolahan survei yang telah dilaksanakan langsung pada desa/kelurahan terpilih) yang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan, Direktorat Statistik Keuangan dan Harga, BPS. Data ini memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing tingkat pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa). Disamping itu untuk melengkapi data ini, diperoleh juga data dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), Departemen Keuangan.
2. Data jumlah pegawai negeri sipil yang dirinci menurut status kepegawaian, golongan, departemen/lembaga, dan provinsi yang diperoleh dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).

2.3.4. Metodologi

1. Neraca Produksi Pemerintah.

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah terlebih dahulu harus disusun **neraca produksi pemerintah**, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah, terdiri dari pengeluaran untuk belanja barang/biaya antara, balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar lainnya) dan penjualan dari barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan. Uraian komponen-komponen neraca produksi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. **Output** pemerintah terdiri dari, output pasar dan output non pasar lainnya. **Output non pasar lainnya** adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang

dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan **output pasar** pemerintah merupakan penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah atas dasar harga yang secara ekonomi tidak berarti, kepada institusi lain atau masyarakat.

- b. **Biaya antara** pemerintah adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa (belanja barang) yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output pemerintah.
- c. **Nilai tambah bruto** pemerintah merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. **Balas jasa pegawai** merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan **penyusutan** merupakan nilai yang disisihkan sebagai pengganti susut atau ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

Bagan Neraca Produksi Pemerintah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Neraca Produksi Pemerintah

Input	Output
Biaya antara (belanja barang) (A)	3. Output (C)
Nilai tambah bruto (B) = (B1)+(B2) 2.1. Penyusutan (B1) 2.2. Belanja Pegawai (B2)	3.1. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Output non pasar lainnya) (D)= (C) - (E) 3.2. Penjualan barang dan jasa (Output pasar) (E)
TOTAL INPUT (C) = (A) + (B)	TOTAL OUTPUT (C)

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar Harga Berlaku

Telah diterangkan sebelumnya, bahwa nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output pemerintah dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dijualnya. Total input merupakan penjumlahan dari biaya antara (belanja barang) dan nilai tambah bruto (belanja pegawai dan penyusutan). Karena di dalam neraca produksi pemerintah, total output sama dengan total input, maka nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total output/input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah.

Untuk pemerintah daerah, belanja barang dan belanja pegawai diperoleh dari sisi pengeluaran APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan desa. Karena datanya belum tersedia, maka penyusutan diperkirakan dua puluh persen terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa (output pasar) diperoleh dari sisi penerimaan APBD yang merupakan penerimaan dari bagian pendapatan asli daerah (PAD) rincian pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi; mencakup belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang terdapat di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan, belanja barang dan belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi ditambah dengan belanja barang, belanja pegawai dan nilai penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang merupakan bagian dari belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas dasar Harga Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan merupakan hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi atas dasar harga konstan. Belanja barang (biaya antara) atas dasar harga konstan didapat dengan mendeflasi belanja barang atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tanpa ekspor.

Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil tertimbang menurut golongan kepangkatan. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi belum diperhitungkan.

Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Meskipun mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun barang modal tetap mempunyai batasan usia ekonomi yang nilainya diukur melalui proses keausan (susut).

2.4.2. Ruang Lingkup

PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) berwujud baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, alat transportasi dan lainnya
2. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tidak berwujud, seperti biaya eksplorasi, *software*, hiburan, kesusasteraan atau benda-benda seni (*artistic original*)

3. Perbaikan besar aset berwujud
4. Biaya transfer kepemilikan aset, seperti biaya pengacara, arsitek, komisi agen perumahan dan sebagainya.

2.4.3. Sumber data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal adalah:

1. Output bangunan dari Sub Direktorat Neraca Industri dan Pertanian
2. Nilai barang modal impor dari Statistik Impor
3. Indeks industri dari Statistik IKKR
4. PDB jasa hiburan, jasa perusahaan dari Neraca Perdagangan & Jasa-jasa
5. PDB sektor pertambangan & penggalian
6. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Perdagangan Besar
7. Publikasi Statistik Pertambangan & Penggalian (Migas & Non Migas)
8. Publikasi Konstruksi (AKI & Non AKI)
9. Laporan keuangan perusahaan

2.4.4. Metode Estimasi

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan “arus komoditi”. Penyediaan atau “supply” barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

1. Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB) tersebut di “deflate” dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

2. Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai *output* sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

Estimasi penghitungan PMTB berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Bagi barang modal yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengalokasikan *output* mesin, angkutan serta barang modal lainnya yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh nilai PMTB atas dasar harga pembelian (ADHB). Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men“deflate” PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan masing-masing jenis barang

modal. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan apabila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan nilai harga konstan dengan indeks produksi barang modal yang relevan. Untuk itu estimasi PMTB diawali dengan menghitung nilai harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai (ADHK) tersebut di “*reflate*” dengan menggunakan indeks harga masing-masing kelompok jenis barang modal sebagai inflatornya. Ini mensyaratkan bahwa nilai harga konstan pada tahun-tahun sebelumnya harus sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan nilai PMTB yang berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor diperoleh melalui 2 (dua) cara.

Pertama nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari nilai total barang impor. Lalu barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utamanya seperti mesin-mesin, moda angkutan dan barang modal lainnya. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokatornya (barang modal impor menurut kode SITC 3 digit). *Kedua* untuk memperoleh nilai PMTB (ADHK) tersebut adalah dengan cara men“*deflate*” estimasi PMTB (ADHB) dengan menggunakan deflator dari indeks harga yang sesuai.

Penghitungan barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor pertambangan, sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan men“*deflate*” nilai ADHB dengan indeks implisit sektor pertambangan. Perangkat lunak ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor jasa perusahaan sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit sektor jasa perusahaan. Penghitungan hiburan, kesusasteraan dan kesenian asli dibedakan atas yang berasal dari domestik dan impor. Penghitungan yang berasal dari domestik dengan mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor jasa hiburan, sedangkan untuk yang berasal dari impor dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap barang modal impor. Untuk mendapatkan PMTB ADHKnya dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan masing-masing indeks harganya, yaitu indeks implisit sektor jasa hiburan dan indeks harga barang impor.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1. Konsep dan Definisi

Secara harfiah inventori atau persediaan didefinisikan sebagai produk barang yang tidak atau belum terpakai pada periode pencatatan; sedangkan secara khusus inventori adalah barang yang belum terpakai dalam proses produksi ataupun konsumsi (antara maupun akhir). Inventori ini tersebar di berbagai unit institusi dengan beragam jenis barang inventornya, baik yang dihasilkan sendiri ataupun bukan, baik yang berupa bahan baku & bahan penolong maupun bukan, baik yang berupa barang tahan lama maupun bukan. Bagi pihak produsen yang menghasilkan inventori, produk ini bisa berupa barang yang belum selesai diproses atau belum terjual.

Perlakuan inventori dalam PDRB ini sedikit agak berbeda dengan komponen-komponen penggunaan akhir lainnya. Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir dengan inventori pada awal periode pencatatan. Hal ini yang menyebabkan perubahan inventori bertanda “positif” ataupun “negatif”. Bertanda positif apabila nilai inventori pada akhir periode (tahun dan triwulan) lebih besar daripada awal (tahun dan triwulan), atau dengan kata lain telah terjadi penambahan. Sebaliknya apabila inventori bertanda negatif maka terjadi pelepasan atau pengurangan atas barang-barang persediaan. Dengan demikian inventori merupakan satu-satunya komponen PDB yang mempunyai dua tanda, positif atau negatif.

2.5.2. Ruang Lingkup

Yang digolongkan sebagai inventori ini adalah persediaan berbagai jenis produk barang yang akan digunakan dalam proses ekonomi lebih lanjut. Penguasa barang inventori bisa perusahaan, pemerintah, rumah tangga maupun masyarakat. Mengacu pada konsep terbaru dalam Sistem Neraca Nasional (SNA'93), dalam Inventori termasuk pula benda-benda berharga yang mempunyai nilai ekonomis (*valuable things*).

Klasifikasi Inventori menurut penguasaan dan jenis barang dibedakan atas:

1. Inventori yang dikuasai oleh perusahaan terdiri dari:
 - Barang Jadi (*Finished goods*)
 - Barang setengah jadi (*Work in process goods*)
 - Bahan baku , bahan penolong dan suku cadang (*Supplies and materials*)
2. Stok atau persediaan barang-barang strategis yang dilakukan oleh pemerintah, untuk tujuan menjaga stabilitas politik-ekonomi dalam negeri, seperti beras, gula, gandum, dan kedelai

Dilihat dari produsen yang menghasilkan (sektor lapangan usaha/sektor industri) seperti pada sektor-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, gas, air bersih dan konstruksi/bangunan, dimana komoditi yang dihasilkannya diantaranya: beras, jagung, kopi, tebu, kopra, kelapa, teh, kayu (log), arang, bambu, ikan beku, udang beku, minyak bumi, batubara, timah, biji besi, makanan jadi, bahan kimia, semen, alat-alat listrik, mesin-mesin, moda angkutan, gas kota, bangunan dan sejenisnya

Lebih jauh inventori dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi (Bahan baku, bahan penolong dan suku cadang).
2. Barang yang belum selesai dalam proses produksi (*Work in Process*).
3. Barang-barang yang belum terjual (yang berada pada pihak produsen atau pedagang).
4. Ternak potong seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya.
5. Tumbuh-tumbuhan yang sekali tebang (seperti: pinus, bakau dll) dan budidaya perikanan yang semuanya diusahakan dan berada dalam pengawasan. Barang tahan lama (*durable goods*) yang masih dalam proses penyelesaian seperti mesin-mesin, pesawat terbang, kapal laut, kapal penyeberangan dan sejenisnya.

2.5.3. Sumber data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi. Pendekatan korporasi digunakan untuk sektor-sektor antara lain: perdagangan, perhotelan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa. Pendekatan komoditi digunakan untuk sektor-sektor yang data-datanya telah dikumpulkan oleh BPS, seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan industri pengolahan.

Pada pendekatan langsung data mengenai posisi inventori maupun perubahan inventori dapat diperoleh dari laporan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Sistem yang berbentuk laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dimana transaksi tersebut biasanya dicatat dalam Neraca Akhir Tahun (NAT) pada kelompok transaksi harta (aset) lancar.

Sementara penghitungan dengan metode atau pendekatan tidak langsung data inventori ini bisa diperoleh dari pencatatan lembaga-lembaga atau institusi yang berkepentingan seperti departemen terkait, asosiasi sejenis, pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan yang datanya antara lain disajikan dalam:

- a. Statistik Perkebunan
- b. Statistik Kehutanan
- c. Publikasi Dirjen Peternakan
- d. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar Sedang
- f. Stok ketahanan pangan (BULOG)
- g. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan "Go Public"

Apabila data inventori tersebut tersedia dalam bentuk kuantum (volume) maka harus dicari data tentang harga rata-rata yang sesuai dengan jenis dan kriteria masing-masing inventori tersebut. Apabila data tersedia dalam bentuk nilai, baik posisi maupun

perubahannya maka dibutuhkan indeks harga yang akan digunakan sebagai deflatornya. Indeks harga tersebut bersumber dari Indeks implisit harga PDB, IHPB, IHK, ataupun indeks harga lain yang tersedia.

2.5.4. Metodologi

Pada seri pengukuran PDB sebelumnya di mana masih menggunakan konsep SNA'68, perubahan inventori belum diperhitungkan secara khusus yakni dihitung dengan cara residual, atau yang merupakan selisih antara total nilai PDB sektoral dengan total nilai PDB menurut penggunaan. Metodologi yang direkomendasikan untuk digunakan saat ini adalah bisa dengan pendekatan langsung untuk tahun-tahun dimana data telah tersedia (seperti tahun 2003 dan sebelumnya) maupun pendekatan tidak langsung untuk tahun dimana data belum tersedia (seperti data tahun 2004). Penggunaan metode langsung dapat dilakukan dengan dua cara seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi, dimana penggunaannya sesuai dengan ketersediaan data.

1. Pendekatan Korporasi

Dilakukan dengan mencatat perubahan inventori pada unit-unit usaha (perusahaan) yang menguasai inventori, baik yang berupa produk yang dihasilkan sendiri maupun bukan, atau dalam kategori lain seperti produk yang berupa bahan baku, bahan penolong maupun produk (jadi dan setengah jadi) yang dihasilkannya sendiri tetapi belum dipasarkan.

Untuk menghitung nilai perubahan inventori diperlukan data nilai inventori dari dua waktu yang berurutan, pada perusahaan yang sama. Nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan men"deflate" nilai buku atau posisi inventori pada satu waktu dengan Indeks Harga Perdagangan Besar sehingga didapat nilai posisi atas dasar harga konstan (ADHK). Kemudian mengurangkan nilai tersebut dengan nilai posisi inventori ADHK tahun sebelumnya. Sedangkan untuk menghitung nilai perubahan inventori (ADHB) dengan meng"inflate" nilai perubahan inventori ADHK dengan Indeks Harga Perdagangan Besar yang sesuai.

2. Pendekatan Komoditi

Disebut juga sebagai pendekatan arus komoditas. Untuk memperoleh nilai inventori (ADHB) adalah dengan menghitung nilai inventori (volume kali harga) masing-masing pada awal tahun dan nilai inventori pada akhir tahun yang sama. Kemudian selisihnya disebut sebagai perubahan nilai inventori ADHB. Untuk memperoleh estimasi harga konstan (ADHK) adalah dengan mengalikan setiap volume (kuantum) awal dan akhir tahun dengan harga tahun tertentu (misalnya harga tahun 2000), kemudian mengurangi nilai akhir tahun tersebut dengan nilai awal tahunnya. Atau dengan cara lain dengan men"deflate" nilai inventori (ADHB) dengan indeks harga IHPB atau indeks implisit PDB yang sesuai dengan kategorinya.

2.5.5. Cara penghitungan

Sedangkan untuk penghitungan digunakan metode revaluasi dan ekstrapolasi. Metode yang pertama digunakan untuk sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan dan peternakan. Sedangkan metode yang kedua digunakan pada sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, transportasi, dan keuangan.

Untuk mengestimasi perubahan inventori pada tahun dimana data belum tersedia digunakan penghitungan metode tidak langsung. Caranya adalah dengan menghitung perbandingan atau rasio barang yang belum digunakan lebih lanjut (persediaan) terhadap total produksinya, masing-masing pada awal dan akhir tahun.

Cara Penghitungan:

Penghitungan perubahan inventori menggunakan 3 Metode yaitu

- Metode Revaluasi
- Metode Deflasi
- Metode Ekstrapolasi

2.6. EKSPOR-IMPOR BARANG DAN JASA

2.6.1. Konsep dan definisi

Ekspor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi ekonomi (berupa penjualan, barter, pemberian berupa hadiah atau hibah) dari residen suatu negara/wilayah kepada non-residen atau pihak luar negeri/wilayah lain. Sedangkan impor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi (berupa pembelian, barter, penerimaan berupa hadiah atau hibah) dari non residen kepada residen suatu negara/wilayah.

2.6.2. Ruang lingkup

1. Ekspor barang dan jasa
2. Ekspor barang dikategorikan menjadi dua kelompok besar, masing-masing migas dan nonmigas. Ekspor migas dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: a. minyak mentah, b. hasil minyak, dan c. gas. Sedangkan ekspor nonmigas dikelompokkan dalam 3 sektor utama, yaitu: a. hasil pertanian, b. hasil industri, c. hasil tambang dan lainnya

Ekspor jasa terdiri dari: a. pengangkutan lain, b. perjalanan, c. komunikasi, d. konstruksi, e. asuransi, f. keuangan, g. komputer, h. royalti dan lisensi, i. bisnis lainnya, j. perorangan, budaya dsb dan k. pemerintah.

3. Impor barang dan jasa

Impor barang dikategorikan menjadi a. impor barang konsumsi, b. impor bahan baku, dan c. impor barang modal. Sedangkan impor jasa, rinciannya sama seperti ekspor jasa.

2.6.3. Sumber data

1. Ekspor-impor barang:

- a. Data bulanan ekspor-impur dalam 2 digit HS, BPS (Sub Direktorat Ekspor- Impor)
- b. Data bulanan ekspor-impur, BPS (Buletin Ringkas Statistik)
- c. Data bulanan ekspor-impur, BPS (Publikasi Indikator Ekonomi)
- d. Data bulanan IHPB ekspor-impur, BPS (Sub Direktorat Harga Perdagangan Besar)

2. Ekspor-impur jasa:

- a. Neraca Pembayaran, Bank Indonesia
- b. Statistik Kunjungan Tamu Asing, BPS (Sub Direktorat Statistik Pariwisata)
- c. Statistik Perkembangan Pariwisata, BPS (Buletin Ringkas Statistik)
- d. Laporan Pengeluaran Penduduk Indonesia ke Luar Negeri, Dep.Kebudayaan
- e. Pariwisata.

3. Untuk Tingkat Regional:

- a. Publikasi Daerah Dalam Angka, BPS Provinsi
- b. Matriks Asal Tujuan Barang, Depdiknas dan Lembaga Penelitian ITB
- c. Data Perdagangan Antar Pulau, Disperindag, SIMOPEL, Adpel

2.6.4. Metodologi

1. Ekspor barang

- a. Estimasi nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku adalah melalui data ekspor barang bulanan dari Statistik Ekspor BPS yang nilainya disajikan dalam dolar AS menurut dua digit HS (terinci dalam 99 komoditi).

- b. Nilai ekspor barang dalam dolar AS tersebut disederhanakan menjadi 18 sektor ekonomi. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar AS tersebut dengan kurs ekspor tertimbang.
- c. Memperkirakan nilai ekspor pembelian langsung. Nilai ekspor pembelian langsung ini dikonversikan pula ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikannya dengan kurs ekspor tertimbang. Kemudian nilai pembelian langsung tersebut ditambahkan pada nilai ekspor barang, diperoleh total ekspor barang atas dasar harga berlaku.
- d. Nilai ekspor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"*deflate*" total nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku tersebut dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU) ekspor sebagai deflatornya.

2. Impor barang

- a. Estimasi nilai impor barang atas dasar harga berlaku, pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan dalam mengestimasi nilai ekspor barang. Nilai impor barang dinyatakan dalam CIF, sehingga komponen biaya asuransinya harus dikeluarkan karena sudah termasuk dalam impor jasa. Seharusnya biaya pengangkutan juga dikeluarkan sehingga diperoleh nilai impor dalam FOB, tapi hal ini belum dilakukan.
- b. Nilai impor barang dalam dolar AS tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar tersebut dengan kurs impor tertimbang.
- c. Nilai impor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"*deflate*" total impor barang atas dasar harga berlaku dengan indeks harga per unit (IHPU) impor.

3. Ekspor-impor jasa

Dilakukan 3 macam estimasi dengan menggunakan analisis runtun waktu, (*decomposition, winter method dan moving avarage*) untuk melihat range yaitu batas atas, tengah dan batas bawah

Untuk nilai berlaku masih melihat peranan nilai ekspor-impor jasa terhadap barang, di mana rasio ekspor berkisar 8-11 persen sedangkan untuk rasio impor berkisar 26-30 persen.

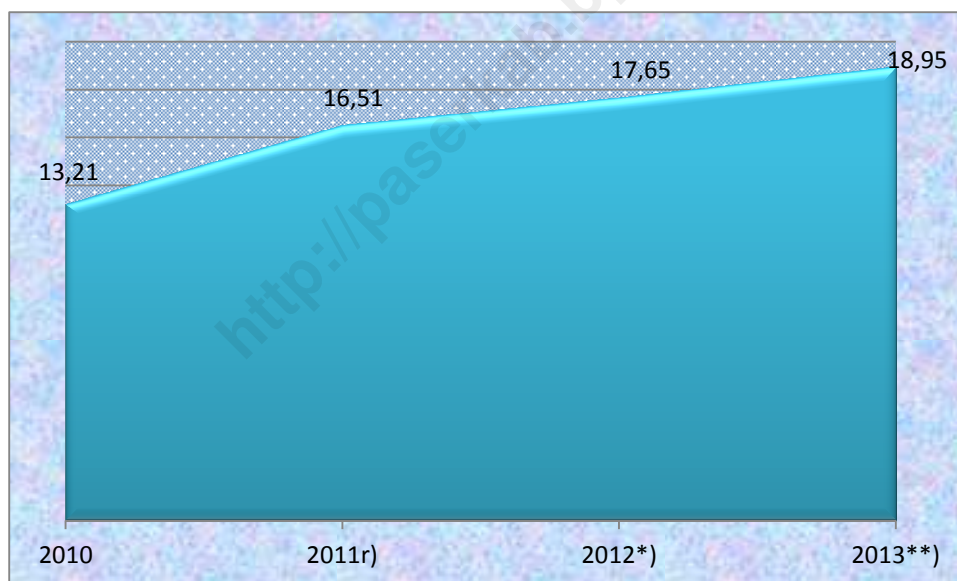
Untuk deflator ekspor-impor jasa menggunakan deflator yang digunakan pada penghitungan ekspor-impor barang, tapi biasanya dilihat kembali pertumbuhannya. Untuk ekspor jasa mengikuti pergerakan angka pariwisata, tapi untuk impor jasa belum tersedia datanya sehingga masih melihat pertumbuhan impor barang.

BAB III

TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Pada tahun 2013 nilai nominal PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 18,95 triliun rupiah atau bertambah 1,29 triliyun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai tambah atas produk barang dan jasa inilah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan akhir berupa **Konsumsi** (oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba dan pemerintah), **Investasi** (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), dan **Ekspor Netto** (ekspor dikurangi impor).

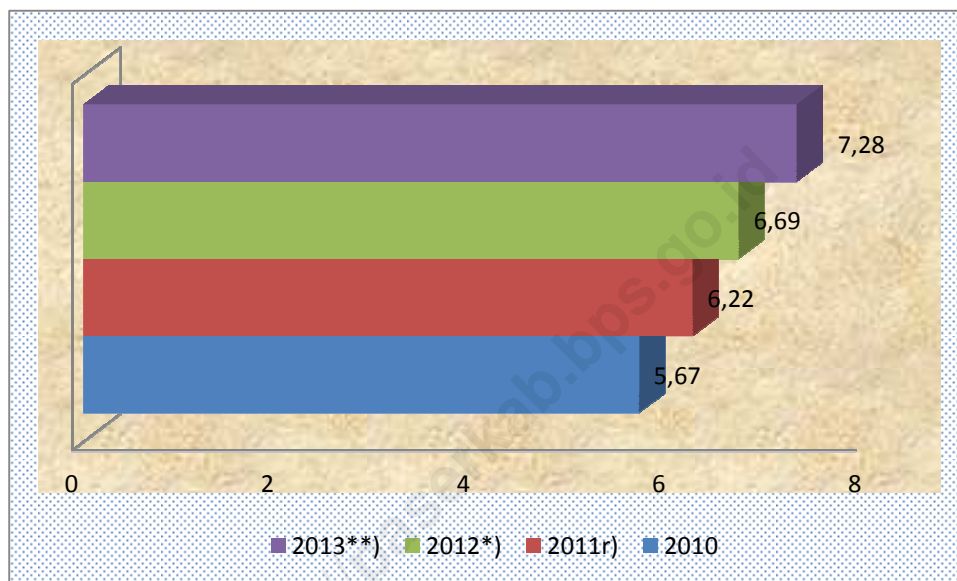
Grafik 1. PDRB Kabupaten Paser (ADHB) Tahun 2010 – 2013
(triliyun rupiah)



Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Paser juga dapat dinyatakan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK 2000). Melalui pendekatan tersebut nilai PDRB yang dihitung menggambarkan tentang perubahan PDRB berdasarkan volume atau menjelaskan atas pengaruh faktor kuantitas saja, tanpa adanya pengaruh harga.

**Grafik 2. PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2000) Tahun 2010 – 2013
(triliyun rupiah)**

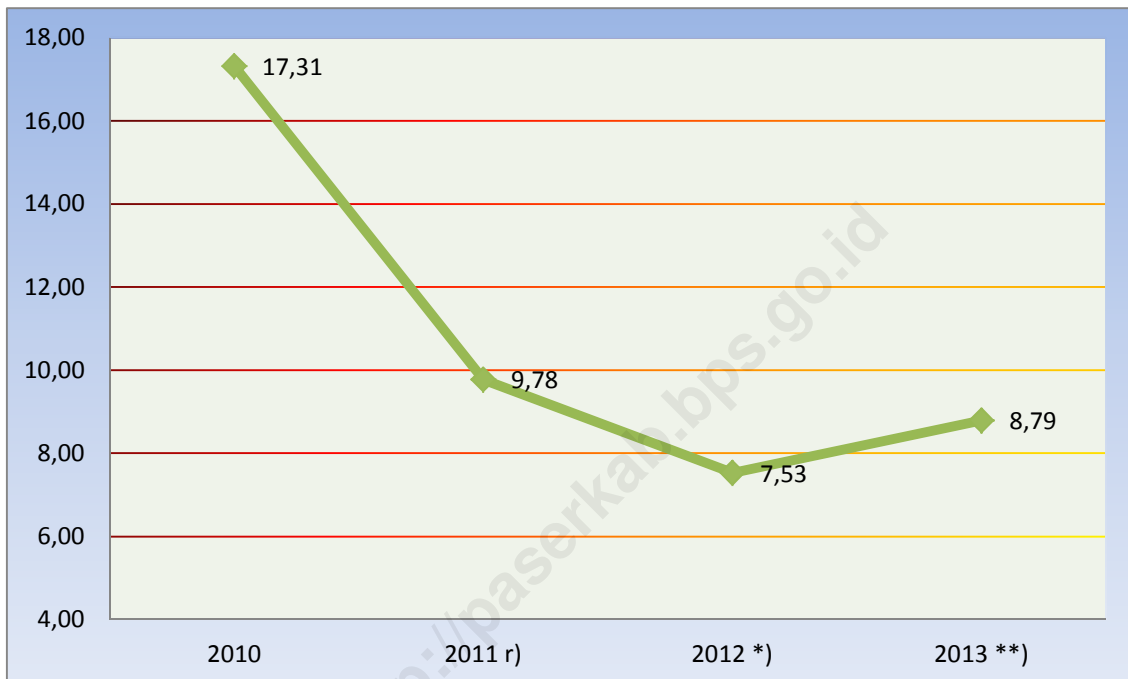


Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*}) Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2000) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Paser mencapai angka 7,28 triliyun rupiah atau bertambah 0,59 triliyun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekonomi secara riil ini dipicu oleh membaiknya kinerja konsumsi akhir dari berbagai komponen penggunaan terutama net ekspor Kabupaten Paser yang masih positif.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2010 – 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Paser mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 8.79 persen.

Grafik 3. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser (ADHK 2000) Tahun 2010 – 2013 (persen)



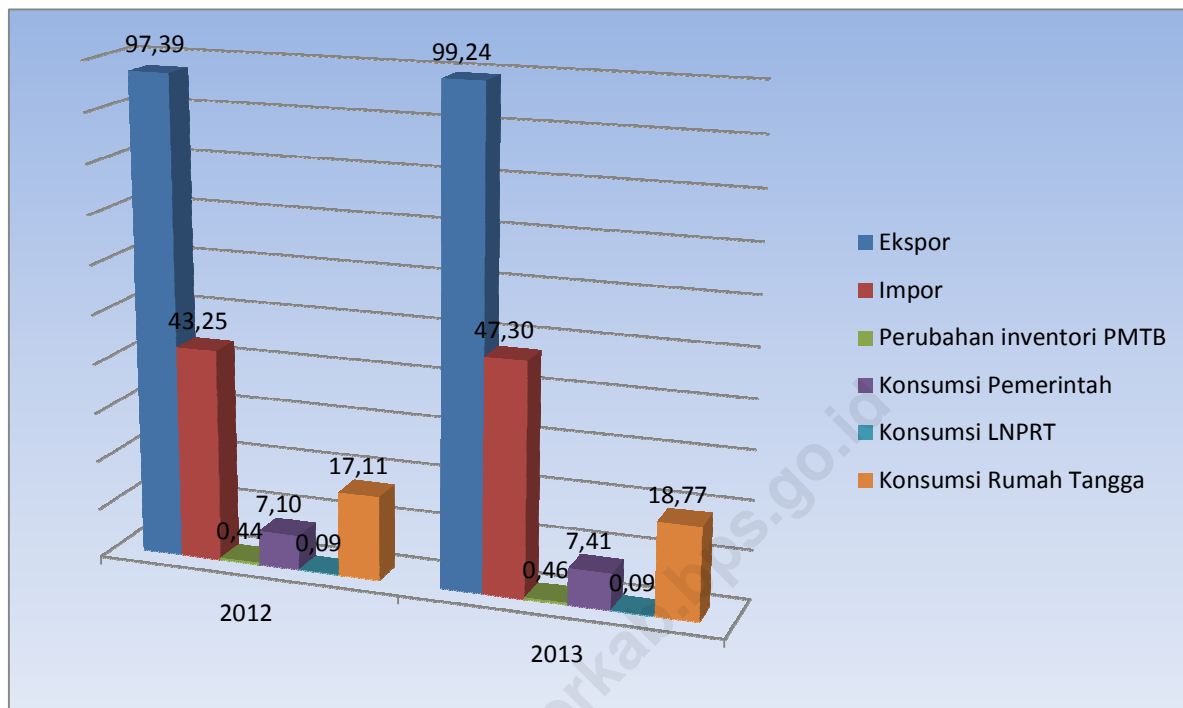
Catatan : ^(r) Angka Revisi ^(*) Angka Sementara ^(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Terbentuknya nilai PDRB Kabupaten Paser menurut penggunaan secara keseluruhan merupakan kontribusi dari beberapa komponen penggunaan antara lain konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor (barang dan jasa) dan impor.

Pada tahun 2013, dari keseluruhan nilai PDRB penggunaan di Kabupaten Paser yang paling dominan adalah terutama ditujukan untuk memenuhi keperluan ekspor (99,24 persen) sementara porsi nilai penggunaan produk (barang maupun jasa) asal impor sebesar (47,30 persen).

**Grafik 4. Distribusi PDRB Menurut Penggunaan
Kabupaten Paser Tahun 2012 - 2013
(persen)**



Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*} Angka Sementara ^{**} Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

BAB IV

PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN PDRB KABUPATEN PASER

MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2011 - 2013

Perubahan perilaku yang terjadi di tiap-tiap komponen penggunaan akhir selama kurun waktu tertentu menentukan bagaimana pola perkembangan struktur ekonomi suatu wilayah. Oleh karena tiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya, maka dinamika masing-masing perilaku komponen tersebut akan diuraikan berikut ini.

4.1. Konsumsi Rumah tangga

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Paser setiap tahunnya, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangganya juga mengalami peningkatan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Adapun proporsi penggunaan PDRB untuk memenuhi konsumsi rumah tangga selama periode tahun 2011-2013 adalah 16,81 persen, 17,11 persen dan 18,77 persen. Terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini dikarenakan tingkat perubahan harga maupun konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga tidak secepat perubahan kuantum, dan nilai yang terjadi di komponen lainnya.

Tabel 4.1.1
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

U r a i a n	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Konsumsi Ruta				
a. ADHB	Juta Rupiah	2 777 230,34	3 020 394,10	3 557 557,12
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	1 953 443,75	2 027 857,64	2 246 117,72
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	16,81	17,11	18,77
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun				
a. ADHB	Juta Rupiah	11,61	12,20	13,88
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	8,17	8,19	8,92
Pertumbuhan¹				
a. Total konsumsi Ruta	%	6,70	3,81	10,76
b. Perkapita	%	2,72	0,29	8,96
Jumlah penduduk	Jiwa	239 221	247 612	256 312

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dilihat secara umum, rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kabupaten Paser menurut harga berlaku, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 rata-rata konsumsi per kapita untuk keperluan makanan dan non makanan selama setahun adalah 12,20 juta rupiah kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 14,13 juta rupiah. Apabila pengaruh inflasi dikeluarkan maka rata-rata konsumsi riil per kapita pertahun atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan nilai pengeluarannya relatif masih pada kisaran 8,92 juta

rupiah pada tahun 2013. Hal ini merefleksikan bahwa tingkat daya beli penduduk Kabupaten Paser mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini akibat dampak luas dari kenaikan harga BBM dan penambahan penduduk. Selain itu juga perlu dipahami adalah bahwa nilai rata-rata konsumsi per kapita tersebut tidak secara otomatis menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan tiap individu, karena untuk keperluan tersebut masih perlu dilengkapi dengan data pelengkap lain diantaranya mengenai pola tabungan dan tingkat distribusi penduduk berdasarkan strata ekonominya.

Tabel 4.1.2
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

U r a i a n	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Struktur Konsumsi Akhir Rata ²⁾				
a. Makanan	Juta Rupiah	1 452 769,19	1 593 674,56	1 848 634,15
b. Non Makanan	Juta Rupiah	1 324 461,15	1 426 719,54	1 708 922,98
Total Konsumsi	Juta Rupiah	2 777 230,34	3 020 394,10	3 557 557,12

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*} Angka Sementara ^{**} Angka Sangat Sementara

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik.

4.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah tangga (LNPRT)

Proporsi nilai konsumsi LNPRT terhadap PDRB relatif masih kecil yaitu hanya sekitar 0,09 persen saja pada tahun 2013 atau tidak ada perubahan (stagnan) dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga ini meliputi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan perhatian dan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Paser hingga perkembangan organisasi politik. Selama tahun 2013 tampak pertumbuhan riil konsumsi LNPRT mencapai angka 10,51 persen dimana sedikit melambat 0,17 persen dibandingkan tahun 2012, namun pertumbuhannya masih positif.

Tabel 4.2.

**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013**

Uraian	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Konsumsi LNPRT				
a. ADHB	Juta Rupiah	13 305,22	15 207,42	17 786,22
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	9 594,41	10 618,65	11 735,09
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	0,08	0,09	0,09
Pertumbuhan ¹	%	10,45	10,68	10,51

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

4.3. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah (pusat maupun daerah yang dikeluarkan di Kabupaten Paser) dalam penggunaan berbagai produk barang dan jasa, baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Pengeluaran pemerintah ini

meliputi pengeluaran untuk belanja barang yang habis pakai, belanja pegawai serta penyusutan dari belanja modal (melalui nilai imputasi) yang selanjutnya masih harus dikurangi lagi dengan penerimaan pemerintah yang berasal dari penjualan barang dan jasa.

Tabel 4.3.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

U r a i a n	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Konsumsi Pemerintah				
a. ADHB	Juta Rupiah	1 044 394,01	1 252 760,16	1 404 440,16
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	788 043,23	890 084,12	930 360,44
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	6,32	7,10	7,41
Pertumbuhan ¹	%	8,48	12,95	4,53

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Secara total pengeluaran konsumsi akhir Pemerintah memperlihatkan kenaikan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 2000. Pada tahun 2012 nilai konsumsi pemerintah tercatat 890 084,12 juta rupiah kemudian di tahun 2013 mencapai 930 360,44 juta rupiah.

Pertumbuhan total konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2010 – 2013 mengalami pertumbuhan yang positif, dimana pada tahun 2012 mencapai 12,95 persen dan pada tahun 2013 mencapai 4,53 persen. Bila mencermati perkembangan nilai konsumsi pemerintah berdasarkan harga konstan 2000, yang selalu meningkat tiap tahunnya, juga menggambarkan secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dalam hal bentuk kemajuan kuantitas pelayanan publik walaupun belum mencapai tahap ideal.

4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB pada data PDRB menurut penggunaan disini lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik (kapital). Dalam hal ini nilai realisasi investasi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas investasi oleh pihak swasta, pemerintah hingga rumahtangga.

Tabel 4.4.1
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

U r a i a n	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total PMTB				
a. ADHB	Juta Rupiah	3 263 448,80	3 728 807,79	4 042 230,83
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	2 638 608,72	2 852 083,46	2 956 192,47
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	19,76	21,12	21,33
Pertumbuhan ¹	%	2,63	8,09	3,65

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*}) Angka Sementara ^{**}) Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Perkembangan PMTB atas harga berlaku selama kurun waktu tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat 3 728 807,79 juta rupiah, kemudian di tahun 2013 menjadi 4 042 230,83 juta rupiah atau naik 313 423,04 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga halnya dengan pertumbuhan total PMTB, yang juga mengalami pertumbuhan meningkat selama kurun waktu 2010 – 2013. Pertumbuhan yang meningkat ini karena adanya berbagai kegiatan seperti pelebaran jalan, pembangunan jembatan dan juga perluasan wilayah bandara di Kabupaten Paser yang masih tahap pengerjaan.

4.5. Perubahan Inventori

Sesungguhnya komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu menjelaskan aspek perubahan inventori dan besaran diskrepansi statistik. Perubahan inventori merupakan perubahan dalam bentuk "persediaan" atas berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Barang tersebut bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku dan penolong, maupun barang strategis pemerintah yang belum terserap oleh pasar.

Berbeda dengan komponen penggunaan lainnya yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis sebatas dari sisi besaran proporsinya saja serta makna tandanya (penambahan atau pengurangan). Perbedaan dalam pendekatan dan tatacara estimasi menyebabkan komponen ini tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana pada komponen lainnya. Secara umum perubahan inventori ini dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan pada akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 4.5.
Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

Uraian	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Perubahan Inventori				
a. ADHB	Juta Rupiah	72 886,46	77 894,01	87 290,89
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	52 558,52	53 884,43	59 108,50
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	0,44	0,44	0,46
Pertumbuhan ¹	%	3,38	2,52	9,69

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dalam kurun waktu 2011 – 2013 proporsi komponen perubahan inventori terhadap PDRB penggunaan Kabupaten Paser selalu positif dan kurang dari 1 persen, bahkan memiliki kecenderungan semakin berkurang sehingga bisa saja mengindikasikan tren kegiatan ekonomi berjalan semakin kondusif, namun demikian disadari bahwa tingkat sensitifitas analisis ini masih rendah untuk mengarah pada suatu kesimpulan tertentu, karena faktor keterbatasan ketersediaan dan kontinuitas data yang dapat dihimpun serta sangat beragamnya komoditas barang yang harus dipantau, jadi untuk masa mendatang informasi ini masih perlu disempurnakan.

4.6. Ekspor

Ekspor menggambarkan tentang berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi diwilayah ekonomi domestik akan tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk keperluan analisis regional (daerah) kriteria ekspor jadi diperluas; tidak hanya menyangkut faktor luar negeri saja tetapi juga dianggap wilayah diluar Kabupaten Paser meskipun masih dalam batas wilayah Indonesia tetap diperlakukan sebagai bagian dari ekspor Kabupaten Paser, sehingga struktur ekspor dirinci menjadi dua yaitu ekspor antar negara dan ekspor antar provinsi.

Perkembangan nilai total ekspor Kabupaten Paser, terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2013 nilai ekspor Kabupaten Paser mencapai 18.808.972,68 juta rupiah atau tumbuh 9,69 persen. Penopang tumbuhnya ekspor di tahun 2013 adalah komoditas ekspor non migas, terutama dari batubara yang peningkatan ekspornya cukup tinggi.

Tabel 4.6.
Perkembangan dan Struktur Ekspor Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

U r a i a n	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Ekspor				
a. ADHB	Juta Rupiah	16 364 426,55	17 193 329,63	18 808 972,68
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	4 366 311,39	4 756 685,31	5 060 894,69
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	99,08	97,39	99,24
Struktur Ekspor ²				
a. Antar Negara		14 379 146,68	15 088 458,38	16 460 826,99
Persentase	%	87,06	85,47	86,85
b. Antar Propinsi		1 985 279,87	2 104 871,25	2 348 145,69
Persentase	%	12,02	11,92	12,39
Pertumbuhan ¹				
a. Antar Negara	%	13,28	10,08	5,85
b. Antar Propinsi	%	2,12	4,23	8,78
c. Total Ekspor	%	3,38	2,52	9,69

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

2 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

4.7. Impor

Sejalan dengan situasi ekonomi, pada tahun 2013 nilai impor barang dan jasa juga mengalami kenaikan. Total impor Kabupaten Paser pada tahun 2013 sebesar 8.965.534,63 juta rupiah atau tumbuh 8,78 persen. Jenis permintaan impor Kabupaten Paser diantaranya adalah mesin dan peralatan barang modal lainnya, bahan baku industri sampai dengan barang-barang konsumsi. Kenaikan barang impor terjadi cukup besar di komponen mesin, peralatan dan barang komsumsi.

Tabel 4.7.
Perkembangan dan Struktur Impor Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2013

Uraian	Satuan	2011 r)	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Impor				
a. ADHB	Juta Rupiah	7 018 949,27	7 634 823,71	8 965 534,63
b. ADHK 2000	Juta Rupiah	3 583 652,14	3 897 728,50	3 982 528,71
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	%	42,50	43,25	47,30
Struktur Impor ²				
a. Antar Negara		323 352,40	379 486,66	452 349,45
Persentase	%	1,96	2,15	2,39
b. Antar Propinsi		6 695 596,87	7 255 337,05	8 513 185,19
Persentase	%	40,54	41,10	44,92
Pertumbuhan ¹				
a. Antar Negara	%	7,20	11,79	8,51
b. Antar Propinsi	%	3,59	8,62	1,86
c. Total Impor	%	2,12	4,23	8,78

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

2 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

DAFTAR ISTILAH PENTING

Domestik adalah batas teritori kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritori suatu negara/wilayah/daerah secara hukum (batas administrasi). Merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang wawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen (penduduk) suatu negara/wilayah ekonomi domestik ke residen negara/wilayah ekonomi domestik lainnya dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen (staf diplomat dan keluarganya). Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar FOB (*free on board*), maka nilai ekspor tidak termasuk pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Ekonomi domestik adalah berbagai kegiatan ekonomi dalam wilayah domestik suatu negara/wilayah/daerah yang dibedakan dengan luar negeri karena konsep “residen”, bukan karena unsur kebangsaan ataupun mata uang. Terdiri dari unit-unit institusi ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi mencakup faktor-faktor yang terlibat dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

Faktor Pendapatan dari Luar Negeri merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu produksi di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

Harga Konstan penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

Impor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan CIF, maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Penyusutan adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Permintaan Antara merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan akhir merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal ekspor.

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang dilakukan oleh para produsen (residen) di wilayah domestik, pada satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*good/tangible*) serta jasa (*service/intangible*).

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan produk yang berasal dari produk domestik dan imr disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi 18 dalam batas ekonomi suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai dengan dua faktor penting yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas berproduksi dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya satu tahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara terhadap negara-negara lainnya (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu negara dianggap sebagai sektor luar negeri / asing (non residen).

Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), dimana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi wilayah udara, darat dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

LAMPIRAN

<http://paserkab.go.id>

**Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASER
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2011 - 2013 (Jutaan Rupiah)**

Jenis Penggunaan	2011 ¹⁾	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 777 230,34	3 020 394,10	3 557 557,12
a. Makanan	1 452 769,19	1 593 674,56	1 848 634,15
b. Non Makanan	1 324 461,15	1 426 719,54	1 708 922,98
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	13 305,22	15 207,42	17 786,22
3. Pengeluaran Pemerintah	1 044 394,01	1 252 760,16	1 404 440,16
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	3 263 448,80	3 728 807,79	4 042 230,83
5. Perubahan Inventori	72 886,46	77 894,01	87 290,89
6. Ekspor	16 364 426,55	17 193 329,63	18 808 972,68
a. Antar Negara	14 379 146,68	15 088 458,38	16 460 826,99
b. Antar Daerah	1 985 279,87	2 104 871,25	2 348 145,69
7. Impor	7 018 949,27	7 634 823,71	8 965 534,63
a. Antar Negara	323 352,40	379 486,66	452 349,45
b. Antar Daerah	6 695 596,87	7 255 337,05	8 513 185,19
PDRB Penggunaan	16 516 742,11	17 653 569,40	18 952 743,27
HARGA KONSTAN			
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 953 443,75	2 027 857,64	2 246 117,72
a. Makanan	972 938,48	1 013 238,00	1 095 803,51
b. Non Makanan	980 505,27	1 014 619,64	1 150 314,21
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	9 594,41	10 618,65	11 735,09
3. Pengeluaran Pemerintah	788 043,23	890 084,12	930 360,44
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	2 638 608,72	2 852 083,46	2 956 192,47
5. Perubahan Inventori	52 558,52	53 884,43	59 108,50
6. Ekspor	4 366 311,39	4 756 685,31	5 060 894,69
a. Antar Negara	3 512 866,72	3 867 116,94	4 093 256,78
b. Antar Daerah	853 444,67	889 568,37	967 637,91
7. Impor	3 583 652,14	3 897 728,50	3 982 528,71
a. Antar Negara	167 885,30	187 675,14	203 637,87
b. Antar Daerah	3 415 766,84	3 710 053,36	3 778 890,84
PDRB Penggunaan	6 224 907,88	6 693 485,11	7 281 880,19

*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

**Tabel 2. LAJU PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASER
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2011 - 2013 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2011 ¹⁾	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
HARGA KONSTAN			
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,70	3,81	10,76
a. Makanan	3,43	4,14	8,15
b. Non Makanan	10,15	3,48	13,37
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,45	10,68	10,51
3. Pengeluaran Pemerintah	8,48	12,95	4,53
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	2,63	8,09	3,65
5. Perubahan Inventori	3,38	2,52	9,69
6. Ekspor	10,91	8,94	6,40
a. Antar Negara	13,28	10,08	5,85
b. Antar Daerah	2,12	4,23	8,78
7. Impor	3,76	8,76	2,18
a. Antar Negara	7,20	11,79	8,51
b. Antar Daerah	3,59	8,62	1,86
PDRB Penggunaan	9,78	7,53	8,79

*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

**Tabel 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASER
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2011 - 2013 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2011 ^{r)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	16,81	17,11	18,77
a. Makanan	8,80	9,03	9,75
b. Non Makanan	8,02	8,08	9,02
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,08	0,09	0,09
3. Pengeluaran Pemerintah	6,32	7,10	7,41
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	19,76	21,12	21,33
5. Perubahan Inventori	0,44	0,44	0,46
6. Ekspor	99,08	97,39	99,24
a. Antar Negara	87,06	85,47	86,85
b. Antar Daerah	12,02	11,92	12,39
7. Impor	42,50	43,25	47,30
a. Antar Negara	1,96	2,15	2,39
b. Antar Daerah	40,54	41,10	44,92
PDRB Penggunaan	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

**Tabel 4. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASER
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2011 - 2013**

Jenis Penggunaan	2011 ¹⁾	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
HARGA BERLAKU			
1. Konsumsi Rumah Tangga	142,17	148,95	158,39
a. Makanan	149,32	157,29	168,70
b. Non Makanan	135,08	140,62	148,56
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	138,68	143,21	151,56
3. Pengeluaran Pemerintah	132,53	140,75	150,96
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	123,68	130,74	136,74
5. Perubahan Inventori	138,68	144,56	147,68
6. Ekspor	374,79	361,46	371,65
a. Antar Negara	409,33	390,17	402,14
b. Antar Daerah	232,62	236,62	242,67
7. Impor	195,86	195,88	225,12
a. Antar Negara	192,60	202,20	222,13
b. Antar Daerah	196,02	195,56	225,28
PDRB Penggunaan	265,33	263,74	260,27

*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

**Tabel 5. LAJU PERTUMBUHAN
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PASER
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2011 - 2013**

Jenis Penggunaan	2011 ^{r)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,97	4,76	6,34
a. Makanan	10,00	5,34	7,26
b. Non Makanan	8,16	4,10	5,65
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6,76	3,27	5,83
3. Pengeluaran Pemerintah	11,12	6,20	7,25
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	7,49	5,71	4,59
5. Perubahan Inventori	6,76	4,24	2,16
6. Ekspor	12,28	-3,56	2,82
a. Antar Negara	10,44	-4,68	3,07
b. Antar Daerah	18,00	1,72	2,56
7. Impor	8,69	0,01	14,93
a. Antar Negara	7,23	4,98	9,86
b. Antar Daerah	8,76	-0,24	15,20
PDRB Penggunaan	13,92	-0,60	-1,32

*) Angka Sementara

*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

Jl. Gajah Mada No. 076 Tana Paser Telp/Fax : 0543-21219
Kabupaten Paser – Kalimantan Timur

Email : bps6401@bps.go.id – Website : <http://paserkab.bps.go.id>